

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembangunan sebuah ketenagakerjaan ini merupakan bagian terpenting dari suatu pembangunan nasional dan berdasarkan UUD pada tahun 1945 serta Pancasila, guna membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dan membangun semua masyarakatnya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta harga diri semua pekerjanya agar terwujud masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, dan merata, baik dari sisi materiil maupun dari sisi spiritual. Pada pembangunan ketenagakerjaan ini dianggap sudah teratur sedemikian rupa sehingga untuk perlindungan serta hak-hak bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh bisa terpenuhi disaat yang bersamaan dan dapat mewujudkan sebuah keadaan kondisi yang kondusif untuk pengembangan dunia usaha.

Demi memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sekarang ini banyak sekali wanita yang bekerja keras agar kebutuhan mereka tercukupi. “Kalimat tersebut memiliki makna yang hampir sama dengan pasal 27 ayat ke (2) UUD 1945 yang berbunyi “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>1</sup>

Kondisi seperti ini menjadikan sebagian besar lapangan pekerjaan ditingkat organisasi menjadi rendah dan tidak harus membutuhkan keterampilan yang khusus sehingga memberikan peluang lebih banyak kepada tenaga kerja wanita. Pada pasal 76 ayat ke (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 13 tahun 2003

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang mengatur tentang Ketenagakerjaan ini memberikan banyak hal berupa keringanan dan kemudahan terhadap buruh atau tenaga kerja wanita.<sup>2</sup>

Bunyi selengkapnya dari pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang rumusannya sebagai berikut :

1. Pasal 76 ayat (1) yang rumusannya :

“Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”.

2. Pasal 76 ayat (2) yang rumusannya :

“Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”.

3. Pasal 76 ayat (3) yang rumusannya :

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

- a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
- b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”.

4. Pasal 76 ayat (4) yang rumusannya :

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

“Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00”.<sup>3</sup>

“Keringanan ini diberikan untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat yaitu reproduksi”.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini, pasal 5 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menentukan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.<sup>5</sup>

Mengingat kalau pihak tenaga kerja wanita merupakan pihak yang lebih lemah daripada pihak atasannya yang berkedudukannya lebih kuat, maka sangatlah perlu mendapatkan perlindungan serta hak-haknya. Karena kebutuhan wanita yang semakin meningkat, maka keinginan bekerja bagi setiap wanita menjadi alasan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya wanita itu ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada semua pihak secara langsung atau tidak langsung.

Selain itu seperti masalah gangguan seksual dan kekerasan juga sering dialami oleh perempuan ditempat kerja, baik oleh teman satu kerjaan, majikan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ngajulu Petrus. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari*, Vol. 3 No. 2. PT. Swara Indah Riau, JOM Fakultas Hukum.UNRI. Hal. 02.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

atau orang lain. Gangguan ini bisa berbentuk komentar-komentar atau ucapan-ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi seksual. “Pekerja perempuan yang mendapatkan pelakuan yang tidak sewajarnya dari teman kerja, tidak menyadari bahwa tindakan yang mengarah pada konotasi seksual akan berdampak sangat fatal dan sudah melanggar dari hak asasi pekerja perempuan”.<sup>6</sup>

“Salah satu perusahaan yang mempekerjakan perempuan pada zaman sekarang adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU juga merupakan suatu prasarana umum dan tersedia secara menyeluruh di tiap-tiap kota, kabupaten, wilayah maupun provinsi yang disediakan oleh perusahaan PT. Pertamina sebagai fasilitas masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan dari bahan bakar. Pada umumnya di SPBU menjual berbagai bahan bakar seperti jenis premium, pertamax, solar, dan juga pertamax plus”.<sup>7</sup>

Ada salah satu peristiwa atau kasus yang terjadi di SPBU daerah Tanjung Morawa, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang dan beredar di media sosial berupa sebuah video. Yakni ada seseorang oknum TNI diketahui bernama Kopda Dodi Samudra Efendi telah melakukan kekerasan terhadap seorang wanita yang saat itu sedang bekerja di SPBU. Dalam video yang terekam tersebut, terlihat seorang pria sedang menaiki sepeda motor dengan istrinya menggunakan motor dinas bernomor polisi ciri khas TNI datang ke SPBU. Kemudian ada petugas SPBU wanita meminta sepeda motor tersebut supaya

---

<sup>6</sup> Imam Muchtarom, 2010. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*. Surakarta Laporan Penelitian. FH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 03.

<sup>7</sup> PT Pertamina, *Info dan Pengertian SPBU*, <http://spbu.pertamina.com/>, diakses tanggal 6 November 2018

mengisi bensin di tempat khusus sepeda motor, karena tempat pengisian yang digunakan oknum tersebut berada di jalur mobil. Seorang istri TNI yang dibonceng langsung turun dan tak terima lalu mendatangi petugas SPBU yang berjaga, kemudian terjadi cekcok antara petugas dan istri TNI tersebut. Kemudian dalam rekaman video itu juga terlihat bahwa istri TNI tersebut hendak memukul petugas SPBU. Selang beberapa lama terjadi cecok, pada video yang terekam itu nampak seseorang oknum TNI yang menaiki motor secara tiba-tiba turun dan bereaksi dengan menerjang petugas SPBU wanita menggunakan kakinya hingga petugas wanita itu terjungkal.<sup>8</sup>

Hal yang lain yang menjadi permasalahan yakni, karena di wilayah Trenggalek merupakan wilayah yang tidak terlalu banyak penduduk, maka sangat rentan sekali jika terjadi kekerasan bagi perempuan jika berjaga di SPBU pada malam hari. Bahkan salah satu karyawan yang bernama Bapak Aziz juga mengatakan kalau di wilayah Trenggalek ini pada pukul 21.00 WIB malam pun suasananya sudah sepi. Dan apalagi pada jam-jam malam seperti itu biasanya ada orang yang keadaan fisiknya tidak stabil atau mabuk kemudian mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Itu sangat membahayakan sekali bagi pekerja wanita yang sedang berjaga pada malam hari, sedangkan di SPBU tempat Bapak Aziz bekerja ini tutup pada pukul 23.00 WIB malam dan tidak ada satupun seorang satpam atau petugas keamanannya. Banyak juga SPBU di tempat lain

---

<sup>8</sup> Lian Juntac, *Kekerasan Terhadap Seorang Perempuan Yang Bekerja di SPBU oleh Oknum TNI*, <http://medan.tribunnews.com/2018>, diakses tanggal 6 November 2018

khususnya wilayah Trenggalek yang keamanannya sangat minim, karena di beberapa SPBU lainnya juga mempekerjakan perempuan sebagai karyawannya.<sup>9</sup>

Karyawan SPBU Bapak Aziz juga mengatakan bahwa “sebenarnya pekerjaan ini ada tiga shift dalam bekerja, yakni pertama pagi sampai sore, kedua sore sampai malam, dan ketiga yaitu dini hari sampai pagi. Namun tidak menutup kemungkinan kalau diantara shift tersebut pasti ada pekerja perempuan yang beroling dan mendapatkan jam kerja untuk menjaga SPBU pada malam hari atau shift kedua”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aziz tersebut, seharusnya pemilik perusahaan tersebut menyediakan jasa keamanan dan selain itu juga menyediakan angkutan antar jemput, karena itu akan memberikan rasa aman terhadap pekerja yang jam kerjanya pada malam hari. Walaupun karyawan atau pekerja wanita yang bekerja pada malam hari telah menyatakan kesanggupan diri untuk bekerja sesuai dengan kondisi perusahaan, namun setidaknya perusahaan sebaiknya juga memperhatikan kondisi pekerjaanya dalam menjaga keamanan dan keselamatan pekerjaanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan secara jelas mengenai hak-hak tenaga kerja wanita. Akan tetapi di SPBU daerah Trenggalek belum menerapkan tata aturan tersebut. Dikarenakan masih sangat lemahnya pengetahuan-pengetahuan tentang hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja wanita. Perlindungan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Aziz, Karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Hari Sabtu 8 September 2018, Bertempat di rumah Bapak Aziz

<sup>10</sup> *Ibid*

hukum mengenai hak-hak pekerja seorang wanita ini sudah jelas tertulis dan diatur dalam undang-undang, tetapi implementasi terhadap pekerja perempuan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dapat dilihat di SPBU Trenggalek yang masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya di SPBU wilayah Ngantru, Tugu dan Karangsono yang tidak memberikan keamanan penjagaan berupa satpam. Padahal di wilayah tersebut rentan akan terjadi kekerasan yang dapat menimpa petugas SPBU. Selain karena SDM masyarakat Trenggalek yang masih dibawah rata-rata ini, maka juga mempengaruhi akan parahnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada waktu-waktu tertentu yang dimana itu membahayakan pekerjaanya seperti pada waktu malam hari, karena di SPBU lebih memprioritaskan pemasukan daripada keselamatan pekerjaanya. Padahal kesejahteraan dan keselamatan dari pekerja wanita termasuk salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan tersebut.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah meneliti tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari. Antara lain yang pertama Eka Mozaldi R.A. yang dalam skripsinya pada tahun 2015 dari Universitas Muhammadiyah Negeri Malang dengan judul “Implementasi Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (Studi di SPBU Jalan Bandung, SPBU Jalan Raden Panji Suroso, SPBU Bumi Ayu Kota Malang)”. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti di SPBU mengenai

tenaga kerja wanita, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan implementasi pemenuhan hak tenaga pekerja wanita langsung dari beberapa SPBU.<sup>11</sup>

Penelitian yang kedua oleh Agnes Anastasia dalam skripsinya pada tahun 2012 dari Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Pandangan Laki-Laki Terhadap Perempuan Yang Bekerja di SPBU BBM (Studi Kasus SPBU Di Kota Makasar)”. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti di SPBU mengenai pekerja wanita, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yang dimana penulis ini mengkaji tentang pandangan laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di SPBU dan letak lokasi penelitian berbeda.<sup>12</sup>

Penelitian yang ketiga oleh Sella Hertantin Irawan pada tahun 2011 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember”. Hasil penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum buruh perempuan yang bekerja di Diskotik Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk

---

<sup>11</sup> Eka Mozaldi R.A. *Implementasi Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (Studi di SPBU Jalan Bandung, SPBU Jalan Raden Panji Suroso, SPBU Bumi Ayu Kota Malang)*, <http://eprints.umm.ac.id/>, diakses tanggal 11 November 2018

<sup>12</sup> Agnes Anastasia, *Pandangan Laki-Laki Terhadap Perempuan Yang Bekerja di SPBU BBM (Studi Kasus SPBU Di Kota Makasar)*, <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses tanggal 11 November 2018.



menganalisis kendala-kendala yang muncul terhadap perlindungan hukum buruh perempuan serta mencari solusi untuk mengatasinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka perlunya kesadaran hukum bagi pengusaha pemilik perusahaan untuk memperhatikan perlindungan hak-hak tenaga kerja terhadap perempuan. Dengan adanya problem ini, maka penulis tertarik untuk meninjau secara yuridis sosiologis dan mengambil judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di SPBU Pada Malam Hari Ditinjau Dari Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi SPBU Kabupaten Trenggalek)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan dan diuraikan diatas, maka dari itu dapat dirumuskan suatu masalah yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU pada malam hari menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah hambatan dalam implementasi peraturan dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dari implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Kabupaten Trenggalek?

---

<sup>13</sup> Sella Hertantin Irawan, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember*, <http://repository.unej.ac.id/>, diakses tanggal 11 November 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU pada malam hari menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi peraturan dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan dari implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Kabupaten Trenggalek.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum

#### **2. Bagi Kalangan Akademisi**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi kalangan dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU pada malam hari ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan.

#### **3. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma baru bagi penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang

bekerja di SPBU pada malam hari ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan, sejatinya perempuan memerlukan sebuah perlindungan pada saat bekerja di malam hari.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi serta pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU pada malam hari ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya, yaitu hukum perusahaan sebagai salah satu referensi tambahan yang membahas mengenai tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta dapat memberi gambaran kepada pembaca mengenai penerapan perlindungan tenaga kerja wanita.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yakni dalam yuridisnya saya meneliti menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan dalam sosiologisnya saya meneliti tentang hukum tenaga kerja wanita yang bekerja di beberapa SPBU pada malam hari.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di daerah Kota Trenggalek yaitu di :

- a. SPBU 54.663.02, Jalan Sukarno Hatta, Ngantru, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66311.
- b. SPBU 54.663.10, Jalan Pahlawan Raya, Karangsoko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66319.
- c. SPBU 54.663.09, Jalan Nglongsor, Tugu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66352.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di SPBU Trenggalek, adalah karena berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, di SPBU Trenggalek terdapat beberapa permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pekerja wanita.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja wanita di SPBU Trenggalek tidak maksimal. Seperti tidak adanya petugas keamanan dan sistem keamanan CCTV pada SPBU, tidak adanya moda transportasi yang diberikan oleh perusahaan pada pekerja wanita yang bekerja hingga larut malam, yang berakibat terhadap kurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan bagi pekerja, khususnya wanita.

### 3. Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini terbagi atas 2 bahan hukum yaitu:

#### a. Data Primer

Data yang berupa keterangan-keterangan diperoleh secara langsung dari lapangan, lokasi penelitiannya yaitu di beberapa SPBU dan melalui hasil penelitian terdahulu, serta wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari bahan-bahan sumber data sekunder yaitu berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi dokumen-dokumen tertulis, hasil penelitian, serta undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perundang-undangan yang terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>14</sup>

Melakukan wawancara dengan beberapa karyawan dan pengelola SPBU:

1. Bapak Rustam Suparjo selaku Pengawas 1 SPBU Ngantru.
  2. Bapak Toni selaku Pengawas 2 SPBU Ngantru.
  3. Ratna selaku operator atau karyawan SPBU Ngantru.
  4. Bapak Aziz selaku operator atau karyawan SPBU Ngantru.
  5. Bapak Suyadi selaku Pengawas SPBU Karangsono.
  6. Purwati selaku operator atau karyawan SPBU Karangsono.
  7. Bapak Akbar selaku Pengawas SPBU Tugu.
  8. Endah selaku operator atau karyawan SPBU Tugu.
- b. Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap SPBU untuk memperoleh suatu gambaran tentang obyek penelitian sesuai tujuan dilakukannya penelitian ini.<sup>15</sup>
- c. Penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta karangan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

---

<sup>14</sup> Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 12.

<sup>15</sup> Juliansyah Noor. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

## 5. Analisa Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini akan dianalisa menggunakan metode komperatif (*comperative method*) yaitu membandingkan hasil penelitian dari beberapa lokasi penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti dan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang berkaitan dengan Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran kepada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan pada bab-bab berikutnya, maka penulis menguraikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I : berisi Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) Bab II : berisi Tinjauan/kerangka teori, yang memuat Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tenaga kerja wanita, tinjauan umum tentang perjanjian kerja, tinjauan umum tentang ketentuan kerja, tinjauan tentang undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perjanjian kerja.

---

<sup>16</sup>Rahardjo, M, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/2010>, diakses tanggal 22 Mei 2018

- 3) Bab III : berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU daerah Kabupaten Trenggalek pada malam hari, apa hambatan dalam implementasi dari perlindungan hukum, serta bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Bab IV : berisi Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

